

MONITORING EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



0264-8224794



<https://dpmptsp.purwakartakab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sampurasun,

Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada periode berikutnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Purwakarta, Pebruari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Hariman Budi Anggoro, ST.MT
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	3
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	3
2.1.1. Sasaran Strategis	6
2.1.2. Sasaran Program.....	7
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	32
3.1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN	32
3.2. RENCANA AKSI	33
3.3. CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI.....	40
BAB IV PENUTUP	57
4.1. KESIMPULAN	57
4.2 SARAN TINDAK LANJUT	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah aspirasi dan cita-cita Masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta) memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah daerah maka dibuatlah Laporan Kinerja

yang berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

1.2. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi capaian

kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Triwulan III tahun 2024 adalah:

1. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaftm strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaftm strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya *good governonce*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar *inline* dengan rencana Pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Dokumen rencana strategis ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan serta penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana strategis ini memuat visi dan misi kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan serta sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah:

VISI:

**"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL
KARIMAH"**

MISI :

Misi 1:

Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Misi 2:

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3:

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4:

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5:

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan. Tujuan adalah merupakan sesuatu

yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 dan Renstra DPMPTSP tahun 2024-2026 pada Misi Ketiga dan Kelima yaitu:

Misi Ketiga

Tujuan:

Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat.

Sasaran:

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.

Strategi:

Membangun Iklim Investasi yang Kondusif dan Berkualitas.

Indikator Tujuan:

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.

Misi Kelima

Tujuan:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.

Sasaran:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.

Strategi:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.

Indikator Tujuan:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat.

2.1.1. Sasaran Strategis

Rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diarahkan berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai, sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa program yang akan dilaksanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam urusan penanaman modal diharapkan mendukung pencapaian sasaran pembangunan ***“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian”*** sebagaimana termuat dalam dokumen RPD Tahun 2020-2024. Berdasarkan pertimbangan sasaran pembangunan daerah, visi-misi serta tujuan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mengampu tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target
Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja
					2024
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp. Triliun	6,73
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capaian SAKIP	Predikat	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik

2.1.2. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Perumusan Sasaran Program harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hal tersebut telah dijabarkan dalam *Cascading*, *Crosscutting* serta Peta Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang menjadi strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam upaya pencapaian tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta diselaraskan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan langsung dengan program unit organisasi dibawah Eselon

II yang mendukung Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja Tahun 2024-2026

No	Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
Meningkatnya Iklim penanaman modal sesuai kebutuhan investor					
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase	5,6	5,8	6,0
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun	6,73	7,20	7,70
3.	Jumlah investor berskala nasional	PMDN/PMA	730	803	884
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase	28,5	29,0	29,5
Program Promosi Penanaman Modal					
Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal					
5.	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Dokumen	2	2	2
6.	Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	Triliun	7,4	7,9	8,4
Program Pelayanan Penanaman Modal					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal					
7.	Rasio daya serap tenaga kerja (Persen)	Persen	18,5	19,0	19,5

8.	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan (Persen)	Persen	94,58	95,58	96,58
9.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	Poin	92,5	93,00	93,50
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal					
10.	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	7,14	8,70	8,70
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
Meningkatnya Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan					
11.	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100%	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
12.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dengan demikian, penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. (Triliun)	8 Triliun

2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capaian SAKIP	Predikat	AA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Persentase)	5,6	110.116.509
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Triliun)	6,73	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	730	
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persentase)	28,5	

2.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	2	177.500.000
		Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	7,4	
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja (Persen)	18,5	135.000.000
		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan (Persen)	94,58	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	92,5	
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	7,14%	585.147.000

5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan		120.000.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		13.108.837.852
Jumlah				14.236.601.361

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

3.1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. dokumen penetapan kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi. Gambaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Indikator kinerja adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Indikator ini sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga individu. Dengan adanya indikator kinerja, dapat mengukur keberhasilaru mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan membuat Keputusan yang lebih baik. Indikator kinerja yang diukur terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU): merupakan indikator yang paling penting dan strategis untuk mencapai visi dan misi organisasi. iku biasanya berfokus pada hasil akhir yang ingin dicapai.
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur spesifik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis suatu organisasi. IKK ini seperti Kompas yang memandu organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKU. IKK lebih spesifik dan terukur dibandingkan IKU.
- c. Indikator Kinerja Individu (IKI): merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja individu dalam mencapai tujuan organisasi.

3.2. RENCANA AKSI

Rencana Aksi DPMPTSP Kabupaten Purwakata tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun rencana aksi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rencana Aksi Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	6,73 T		1.127.763.509				
Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal				146.333.259				
Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		126.333.259				
Subkegiatan :Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1. Penyusunan Perda Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Perkada dan Kepda di Bidang Penanaman Modal	119.816.750		√		
Subkegiatan : Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Kegiatan Usaha	Rekomendasi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang terkena harmonisasi	6.516.509				√

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen		20.000.000				
Subkegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Naskah Akademis RUPM 2025-2030	0				
Subkegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Penyusunan Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha / Purwakarta Investment Project Ready To Offer (IPRO)	20.000.000		√	√	√
Program : Promosi Penanaman Modal				32.696.000				
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		32.696.000,00				
Subkegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Investment Promotion 2. Kosmik / Videografi Promosi Investasi 3. UMK Naik Kelas/Kemitraan 4. Anvesta	17.696.000		√		√

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Subkegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Tim Peningkatan Investasi Daerah	15.000.000				√
Program : Pelayanan Penanaman Modal				135.000.000				
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Laporan		135.000.000				
Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan Usaha	Koordinasi dan Konsultasi dengan OPD, Pemprov dan Pemerintah Pusat	0				
Subkegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	1. Pelayanan dan pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan perizinan berusaha 2. Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Berusaha dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	85.000.000	√	√	√	√

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Subkegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	Pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan Sosialisasi/Diseminasi informasi penanaman modal	20.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaku usaha di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.000.000	√	√	√	√
Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				585.147.000				
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		585.147.000				

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Subkegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22 Kegiatan Usaha	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan 2. Forum Penyelesaian Masalah dan Hambatan 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan	87.771.000		√		
Subkegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	351 Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (BESTIE LKPM)	321.832.000		√	√	√

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Subkegiatan : Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha	1. Inspeksi Lapangan 2. Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 3. Pengawasan terintegrasi, Penganugerahan Perusahaan yang mematuhi pelaksanaan perizinan berusaha	175.544.000	√	√	√	√
Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				142.857.100				
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		142.857.100				

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	1. Pengembangan aplikasi Gaspol dan Pengembangan MPP Digital 2. SILAPAK PRESTASI 3. Pengolahan data, evaluasi dan pelaporan perizinan penanaman modal (RB ZI, Evaluasi Kinerja PTSP, MPP)	142.857.100		√	√	√
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat	A, Sangat Baik		13.286.778.630				
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen		43.334.000				
Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen (DPA, RKA, DPPA, Perubahan RKA, Renja 2025, Perubahan Renja 2024)	15.017.000	√	√	√	

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen LKIP	8.141.000	√			
Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen (LPPD, LKPJ, Laporan Evaluasi Kepatuhan Pelayanan Publik, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan, Laporan Evaluasi PTSP dan PPB)	20.176.000	√	√	√	√
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan		7.435.754.415				
Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.415.759.615	√	√	√	√
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.993.900	√			

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	3 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.900	√	√	√	√
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan		20.000.000				
Subkegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	√	√	√	√
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan		181.881.750				
Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	124.381.750		√		

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Subkegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	85 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57.500.000	√	√	√	√
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan		697.105.804				
Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket Komponen Instalasi	50.000.000	√			
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					
Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.177.995	√			
Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	307.778.809	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	83.149.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Paket	5 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	5.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan koordinasi dan konesultasi	170.000.000	√	√	√	√

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Subkegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	25.000.000	√			
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan		852.620.760				
Subkegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	10 Paket Mebel yang Disediakan	148.499.400			√	
Subkegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit	3 Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk DPMPTSP, MPP dan Teras	704.121.360			√	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan		3.210.421.410				
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	688.656.810	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.511.764.600	√	√	√	√

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan		845.660.491				
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	110.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Laporan Mebel yang Dipelihara	20.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	465 Unit	Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	566.780.491	√	√	√	√
Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000	√			
Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.880.000			√	

3.3. CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI

Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Triwulan IV
Tahun 2024

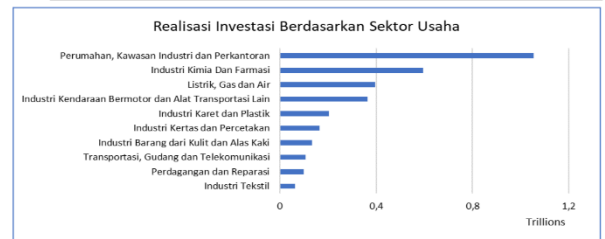
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Realisasi TW IV	Realisasi Sd TW IV	Capaian %
1	2	3	4	5	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp. 8,00 (Triliun)	Rp 3,36 (Triliun)	Rp 8,13 (Triliun)	101,62
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capaian SAKIP	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Info Grafis Capaian Kinerja Investasi Triwulan IV

Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Triwulan IV 2024



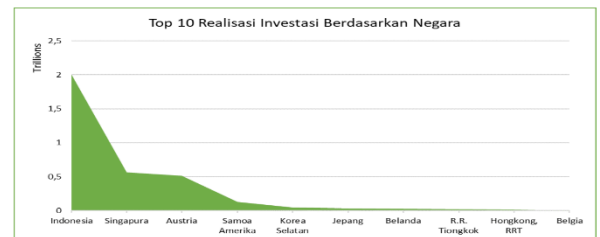
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha Triwulan IV 2024



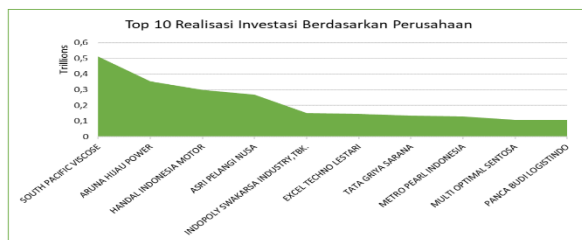
Realisasi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Usaha Triwulan IV 2024



Top 10 Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Triwulan IV 2024



Top 10 Realisasi Investasi Berdasarkan Perusahaan Triwulan IV 2024



Peringkat Realisasi Investasi Triwulan IV 2024

REALISASI INVESTASI PMA, PMDN, DAN TOTAL PMA & PMDN DI JAWA BARAT MENURUT KABUPATEN/KOTA, PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2024									
Peringkat	Total Realisasi PMA & PMDN				Peringkat	KAB. BANDUNG BARAT			
	KAB./KOTA	Jumlah LUPM	Jumlah Investasi (Rp)	Rasio (%)		KAB. BANDUNG BARAT	Jumlah LUPM	Jumlah Investasi (Rp)	Rasio (%)
1	Kab. Karawang	2.586	19.881.875.945.243	30,32	11	Kab. Bandung Barat	1.001	610.471.873.084	1,37
2	Kab. Bekasi	8.738	17.701.613.895.699	26,72	12	Kota Depok	2.509	787.330.558.791	1,19
3	Kab. Bogor	5.615	5.625.083.425.516	8,95	13	Kab. Indramayu	432	792.255.728.011	1,57
4	Kab. Bandung	2.203	3.477.587.833.302	5,26	14	Kab. Cirebon	1.529	688.115.991.250	1,94
5	Kab. Purwakarta	854	3.357.497.122.440	5,07	15	Kab. Garut	711	678.442.864.456	1,02
6	Kab. Subang	664	2.917.693.188.678	4,41	16	Kota Cirebon	674	417.330.172.845	0,63
7	Kota Bandung	8.661	2.219.562.112.200	3,35	17	Kab. Sukabumi	731	411.140.614.678	0,62
8	Kota Bekasi	8.060	2.066.603.190.429	3,17	18	Kota Bogor	1.309	325.228.398.807	0,49
9	Kab. Sumedang	643	1.828.615.768.044	2,81	19	Kab. Ciamis	480	280.572.322.332	0,42
10	Kab. Majalengka	441	1.156.893.328.009	1,75	20	Kota Cimahi	666	170.915.365.085	0,26
					21	Kota Tasikmalaya	446	63.938.927.199	0,10
					22	Kab. Kuningas	143	37.879.323.838	0,06
					23	Kota Banjar	114	26.328.058.782	0,04
					24	Kab. Pangandaran	141	23.952.815.575	0,03
					25	Kota Sukamara	216	18.865.976.552	0,03
					26	Kab. Tasikmalaya	180	16.538.653.851	0,02
					27	Kab. Ciamis	189	13.115.864.021	0,02

Sumber : Data Realisasi Investasi Jawa Barat, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2025



Realisasi Capaian Kinerja
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Triwulan IV Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.286.778.630,00	12.567.703.674,00	94,59%	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.334.000,00	42.889.800,00	98,97%	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.017.000,00	14.626.800,00	97,40%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	100%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.141.000,00	8.141.000,00	100,00%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.176.000,00	20.122.000,00	99,73%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00 Laporan	5.00 Laporan	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.435.754.415,00	6.936.143.901,00	93,28%	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.415.759.615,00	6.918.262.601,00	93,29%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang	46 orang	82%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.993.900,00	9.182.900	91,89%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.900,00	8.698.400	86,98%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3.00 Laporan	3 Laporan	100%



No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	15.850.000,00	79,25%	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	15.850.000,00	79,25%	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.00 Laporan	12 Laporan	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.881.750,00	165.363.250,00	90,92%	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	124.381.750,00	123.947.500,00	99,65%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	100%
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.500.000,00	41.415.750,00	72,03%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85.00 Orang	72 Orang	85%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	697.105.804,00	644.374.062,00	92,44%	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	50.000.000	100,00%	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	100%
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.177.995,00	56.174.995,00	99,99%	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.778.809,00	266.722.514,00	86,66%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.00 Paket	9 Paket	90%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.149.000,00	76.138.000,00	91,57%	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20.00 Paket	20 Paket	100%
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%



No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	165.338.553,00	97,26%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.00 Laporan	189 Laporan	94,50%
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.620.760,00	850.549.645,00	99,76%	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
-	Pengadaan Mebel	148.499.400,00	148.316.526,00	99,88%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10.00 Unit	10.00 Unit	100%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	704.121.360,00	702.233.119,00	99,73%	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.210.421.410,00	3.099.955.751,00	96,56%	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	12 Laporan	100%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.656.810,00	670.462.817,00	97,36%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	100%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.511.764.600,00	2.419.492.934,00	96,33%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40.00 Laporan	40 Laporan	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.660.491,00	812.577.265,00	96,09%	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000,00	90.048.265,00	81,86%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20.00 Unit	16 Unit	84%
-	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.00 Unit	4 Unit	100%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	566.780.491,00	565.815.000,00	99,83%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%



No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00	87.230.000,00	91,82%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	160 Unit	80%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.880.000,00	49.484.000,00	91,84%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	2 Unit	100%
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	146.333.259,00	124.074.000,00	84,79%	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Persentase)	5,60	-45,32	-809%
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Triliun)	6,73	8,12	121%
					Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	730,00	413	57%
					Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persentase)	28,50	33,81	119%
9	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	126.333.259,00	111.791.700,00	88,49%	Jumlah Peraturan Daerah/Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	119.816.750,00	107.585.200,00	89,79%	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
-	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	6.516.509,00	4.206.500,00	64,55%	Jumlah Kebijakan/ Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1.00 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	20.000.000,00	12.282.300,00	61,41%	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00%	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
-	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	20.000.000,00	12.282.300,00	61,41%	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
III	Program Promosi Penanaman Modal	32.696.000,00	29.539.600,00	90,35%	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
					Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	7,40	34,7	469%
11	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.696.000,00	29.539.600,00	90,35%	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	15.000.000,00	14.945.600,00	99,64%	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	1 Dokumen	100%
-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	17.696.000,00	14.594.000,00	82,47%	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	1 Dokumen	100%
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	135.000.000,00	119.257.530,00	88,34%	Rasio daya serap tenaga kerja (Persen)	18,50	34,50	186,49%
					Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan (Persen)	94,58	97,00	102,56%
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	92,50	96,50	104,32%

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
12	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	135.000.000,00	119.257.530,00	88,34%	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	32,12%	215%
-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	85.000.000,00	80.444.550,00	94,64%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	30000 Pelaku Usaha	500%
-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	30.000.000,00	25.520.500,00	85,07%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	75%
-	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.000.000,00	13.292.480,00	66,46%	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Pelaku Usaha	35 Kegiatan Usaha	70%
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	585.147.000,00	527.593.730,00	90,16%	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	7,14%	8,00%	112%
13	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	585.147.000,00	527.593.730,00	90,16%	Persentase pelaku usaha yang terkendali dalam penerapan ketentuan penanaman modal	100%	129%	129%



No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	87.771.000,00	87.049.080,00	99,18%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha.	80 Kegiatan Usaha.	100%
-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	321.832.000,00	319.216.650,00	99,19%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	351 Pelaku Usaha	420 Pelaku Usaha	120%
-	Pengawasan Penanaman Modal	175.544.000,00	121.328.000,00	69,12%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	22 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	168%
V	Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal	142.857.100,00	142.389.600,00	99,67%	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100%	100%	100%
14	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.857.100,00	142.389.600,00	99,67%	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
-	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	142.857.100,00	142.389.600,00	99,67%	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	100%
TOTAL		14.328.811.989,00	13.510.558.134,00	94,29%				

Analisis tingkat capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan pada setiap urusan penanaman modal dan urusan penunjang penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1) Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, bertujuan untuk menganalisis kebijakan apa saja yang dapat diberikan kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas / insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta daripada daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak/retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman modal dan sebagainya. Pada Tahun 2024 telah diundangkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha serta Kajian Akademis Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - Telah dibuat Naskah Akademis dan Draft Raperda Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dikarenakan terkendala waktu pembahasan di legislatif.
- 2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil investasi di Kabupaten Purwakarta yang akan ditransformasikan dalam bentuk informasi digital pada laman *website* (<https://investasi.purwakartakab.go.id>), serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2024 data peta potensi telah mengalami penambahan data peta untuk memudahkan investor mengakses informasi penanaman modal.
 - Telah diupdate peta potensi investasi

Dokumentasi Kegiatan Penyediaan Peta Potensi



- 3) Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis Risiko merupakan kegiatan dalam pemberian rekomendasi/saran teknis kepada pimpinan terkait kebijakan sektor usaha yang terdampak dari kebijakan pemerintah daerah.

- telah dilaksanakan

b. Program Promosi Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi Penanaman Modal adalah :

- 1) Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Penyusunan identifikasi terhadap metode dan cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan promosi penanaman modal, terutama dalam penguatan *image* Kabupaten Purwakarta sebagai tujuan investasi.
- 2) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,

- dalam upaya peningkatan profil kawasan industri menjadi lebih berkembang telah dibuat video profil investasi untuk dilakukan promosi melalui media sosial dengan meningkatkan *engagement* media sosial.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pelayanan Penanaman Modal adalah:

- 1) Penyediaan Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - a. Dilaksanakan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara dan Teras Madukara yang terdapat pada 5 (lima) kecamatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Selain itu dilaksanakan pelayanan sampai tingkat desa yang diutamakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tahun 2024 telah dilaksanakan Gebyar NIB di semua kecamatan untuk para pelaku UMKM agar semakin mudah mengakses sumber pembiayaan baik perbankan maupun non bank. Selain itu, kemudahan dalam mendapatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM seperti sertifikat halal dan PIRT. Selama tahun 2024 telah terbit sebanyak 39.862 NIB dari target 19.582 NIB. Salah satu aspek penting NIB adalah dapat selaras dengan upaya untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dengan cara meningkatkan legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah agar usahanya dapat dipercaya oleh perbankan dan mitra bisnis. Tugas pemerintah adalah menciptakan atmosfernya serta menciptakan ekosistemnya.
 - b. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Hasil survey kepuasan masyarakat memberikan indeks kepuasan sebesar 96,5 dengan predikat sangat baik.

Dokumentasi Kegiatan Pelayanan



- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
 - Dilaksanakan koordinasi terjadwal serta pembahasan persetujuan perizinan berusaha oleh Tim Penataan Ruang yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah.
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan.
Permasalahan :

- Dibuat tenan Klik Penanaman Modal dan Pengaduan Masyarakat di MPP Bale Madukara. kegiatan ini bertujuan untuk memastikan layanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada masyarakat berjalan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria. Selain itu disediakan pula sarana pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, baik secara *online* maupun *offline*, sebagai sarana evaluasi dan pengendalian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Dokumentasi Klinik Penanaman Modal



d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didukung oleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF). Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah:

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.

Permasalahan :

- Telah dilaksanakan

- 2) Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha.

- Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaporan kegiatan penanaman modal saat ini dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi yaitu OSS RBA, SIMBG, SiCantik dan Gaspol,

karenanya diperlukan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha untuk dapat menjalankan Sistim secara baik dan benar. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah kewajiban yang harus dilaporkan oleh pelaku usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara berkala. LKPM membantu pemerintah dalam memonitor perkembangan investasi, realisasi proyek, serta kendala yang dihadapi oleh investor di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tata cara penyusunan LKPM menjadi sangat penting bagi pelaku usaha. Bimbingan Teknis ini meliputi pelatihan proses perizinan berusaha dan penyusunan LKPM yang bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif kepada pelaku usaha, agar dapat mengoperasikan sistem perizinan dan menyusun laporan penanaman modal dengan benar, sesuai regulasi terbaru, serta menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada kesalahan administrasi penanaman modal. Melalui pelatihan ini, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kepatuhan dalam melaporkan kegiatan usahanya. Tahun 2024 telah dilaksanakan Bimtek sebanyak 3 kali dengan total pelaku usaha yang mengikuti sebanyak 420.

Dokumentasi Kegiatan Bimtek



3) Pengawasan Penanaman Modal

- Pembinaan dan pemantauan kegiatan penanaman modal melalui Pengawasan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan analisa data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

melalui Sistem OSS RBA sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor. Pengawasan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas realisasi penanaman modal dan implementasi perizinan berusaha, kesesuaian antara jenis perizinan berusaha yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan, serta peraturan perundangan dari perizinan berusaha yang dimiliki oleh suatu Perusahaan. Pengawasan mempunyai fungsi utama dalam mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal, termasuk didalamnya kepatuhan terhadap pelaporan penanaman modal (LKPM).

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan



e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal



- 1) Penyusunan Pelaporan Realisasi Investasi dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha, bertujuan untuk memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan penanaman modal.
- 2) Alih Media Arsip Perizinan, merupakan kegiatan konversi arsip perizinan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital, bertujuan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan ruangan arsip dan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu proses pencarian arsip apabila diperlukan.
- 3) Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan data dan informasi untuk mendukung terhadap Penilaian penyelenggaraan PTSP, PPB, Evaluasi pelayanan publik terkait kepatuhan pelayanan dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP. Pengembangan Sistem Informasi pendukung OSS RBA yaitu Perizinan Gawai Administrasi Perizinan Online (GASPOL) dan Pengembangan Website.

Interface Gaspol



BAB IV PENUTUP



4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024.

Faktor Penghambat :

1. Strategi pengembangan iklim dan promosi belum dapat meningkatkan pencapaian *outcome*
2. Dibutuhkan pemahaman investasi secara inklusif untuk dapat menyelaraskan tujuan dan sasaran dari pencapaian investasi
3. Dukungan Anggaran kurang memadai dikarenakan kebutuhan anggaran untuk pengelolaan MPP yang menjadi prioritas kegiatan dalam pencapaian pelayanan publik yang prima mengurangi anggaran urusan penanaman modal.

Faktor Pendukung:

1. Digitalisasi pelaporan kegiatan penanaman modal
2. Digitalisasi Pelayanan Perizinan

4.2 SARAN TINDAK LANJUT

1. Peningkatan Koordinasi antar tim kerja dan peningkatan pemahaman anggota tim terhadap tujuan dan sasaran kinerja peningkatan investasi
2. Pemberian pemahaman kepada tim kerja terkait tujuan dan sasaran yang berbasis hasil / *result oriented*.